

DEKONSTRUKSI HISTORIOGRAFI INDONESIA

**Gugatan Ahmad Mansur Suryanegara
terhadap Deislamisasi Sejarah Indonesia**

MAKALAH

disampaikan dalam Bedah Buku *Api Sejarah* Jilid 1 dan 2 dengan tema
“Belajar dari Sejarah untuk Menguak Kebenaran”.
Diselenggarakan oleh Rumah Keilmuan dan Keadaban (RkiK) Mujahidin,
Badan Ta'mir Masjid Raya Mujahidin pada 7 Agustus 2011
di Auditorium Masjid Raya Mujahidin Jl. Sancang No. 6 Bandung

Oleh

Mumuh Muhsin Z.



**JURUSAN SEJARAH FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS PADJADJARAN
JATINANGOR
2011**

DEKONSTRUKSI HISTORIOGRAFI INDONESIA

Gugatan Ahmad Mansur Suryanegara
terhadap Deislamisasi Sejarah Indonesia¹

Oleh

Mumuh Muhsin Z.²

Abstrak

Sejarah itu milik pihak yang menang. Pemenangnya adalah penguasa. Oleh karena itu, penguasa seakan memiliki hak untuk mendominasi sejarah, dalam arti memproduksi tulisan sejarah (historiografi). Kebenaran sejarah adalah sejarah versi penguasa. Kebanyakan sejarawan muslim Indonesia termasuk kategori *silent majority*, diam seriba bahasa melihat kenyataan itu. Ahmad Mansur Suryanegara adalah kekeualian. Beliau tampil dengan semangat dekonstruksi, semangat menggugat dan membongkar historiografi Indonesia yang mengecilkan bahkan menghilangkan peran ummat Islam dari panggung Sejarah Indonesia.

Pengantar

Ahmad Mansur Surianegara menulis buku berjudul *Api Sejarah* dalam dua jilid. Jilid pertama terdiri atas 578 halaman dan jilid dua juga 578 halaman. Secara fisik ukuran buku ini cukup besar, 17 x 24,5 cm. Kedua buku ini mendapat predikat *best seller*. Kriteria sebuah buku mendapat predikat *best seller* adalah bila dalam 6 bulan terjual minimum 6.000 eksemplar. Artinya, buku tersebut dianggap sebagai buku “yang laris”, meski belum tentu yang “paling laris”. Memang, jumlah minimum penjualannya masih berbeda-beda, bahkan di internal kelompok penerbitan Gramedia sekalipun. Ada yang menggunakan indikator

¹ Makalah disampaikan dalam Bedah Buku *Api Sejarah* Jilid 1 dan 2 dengan tema “Belajar dari Sejarah untuk Mengungkap Kebenaran”. Diselenggarakan oleh Rumah Keilmuan dan Keadaban (RkiK) Mujahidin, Badan Ta’mir Masjid Raya Mujahidin pada 7 Agustus 2011 pukul 09.00 – 11.30 WIB di Auditorium Masjid Raya Mujahidin Jl. Sancang No. 6 Bandung.

² Staf Pengajar Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bandung.

minimum 400 eks/bulan; dan ada yang menggunakan indikator minimum 850 eks/bulan selama 12 bulan berturut-turut (Harefa, 2009).

Untuk sebuah buku sejarah, hal tersebut menunjukkan sesuatu yang luar biasa dan bukan hal yang sederhana. Kenyataan seperti itu menjadi petunjuk untuk banyak hal. Di antaranya adalah ternyata masih banyak manusia Indonesia yang mau membaca buku sejarah. Kedua, buku Ahmad Mansur Suryanegara ini memiliki kualifikasi tertentu di mata masyarakat. Ketiga, isu yang diangkat penulis memiliki *sense of relevance* dengan kebutuhan emosi masyarakat Indonesia, khususnya orang Islam. Keempat, bisa jadi buku ini dapat dijadikan sebagai model alternatif historiografi Sejarah Indonesia.

Bagi saya, yang pernah jadi mahasiswa yang kemudian menjadi asisten Bapak Ahmad Mansur Suryanegara, buku *Api Sejarah* ini lebih merupakan dokumentasi pemikiran penulisnya. Dalam perkuliahan-perkuliahan beliau – beliau memegang mata kuliah Sejarah Islam Indonesia, Pengantar Ilmu Politik, dan Filsafat Sejarah – materi yang dibahas dalam buku tersebut adalah juga materi yang pernah disampaikan dalam perkuliahan. Beliau ternyata sangat konsisten dengan pemikiran-pemikirannya.

Indonesia memiliki banyak sejarawan muslim. Akan tetapi tidak banyak sejarawan muslim di Indonesia yang memiliki komitmen kuat terhadap Islam yang secara konsisten tercermin dalam perilaku aktual kesejarawanannya, dalam tulisan-tulisannya dan ceramahnya misalnya. Buku yang beliau tulis ini betul-betul dipersembahkan kepada ummat.

Bagi beliau sejarah Indonesia adalah sejarah ummat Islam. Segala kejadian dan momen penting di negeri ini adalah dipelopori oleh kaum muslimin. Oleh karenanya, hendaknya peran ummat Islam dalam sejarah Indonesia harus dieksplisitkan. Kenyataannya tidak demikian. Di Indonesia telah terjadi deislamisasi tulisan-tulisan sejarah. Peran ummat Islam disembunyikan. Simbol-simbol yang menunjukkan peran ummat Islam sengaja tidak dipakai untuk momen-momen penting nasional. Atas semua kejadian itu Ahmad Mansur melakukan perlawanan. Beliau melakukan dekonstruksi, pembongkaran terhadap tulisan sejarah Indonesia. Perlawanan itu berwujud buku *Api Islam*.

Pemikiran Teoretis

“Sekali air bah, sekali tepian beralih”. Secara harfiah, kalimat tersebut hanya melukiskan peristiwa alam biasa saja. Kalau banjir datang, tepian tempat mandi tidak lagi bisa di tempat yang lama. Akan tetapi sebagai pepetah – tepatnya, pepatah adat Minangkabau – maksud kalimat tadi ialah “setiap terjadi peristiwa sosial-politik yang dahsyat, perubahan sosial tak bisa dihindari”. Dalam perubahan sosial ini bukan saja sistem pemerintahan atau struktur mengalami perubahan, tapi gambaran dan visi tentang masa lalu pun mengalami revisi (Abdullah, 2001: 284).

Di kalangan sejarawan gugatan terhadap gambaran masa lalu adalah hal yang normal karena hal itu merupakan bagian dari dinamika ilmu dan pengetahuan sejarah. Oleh karena itu, kita mungkin bisa menemukan ada beberapa buku yang ditulis tentang hal yang sama. Gugatan terhadap gambaran sejarah itu bisa juga dilakukan oleh politisi, seniman, filosof, tokoh masyarakat, dan sebagainya dengan motivasi masing-masing.

Semua itu menggambarkan banyak hal penting. **Pertama** berkaitan dengan makna ganda sejarah: sejarah sebagaimana peristiwa tertentu pada masa lalu (*history as actually happened*, atau *histoire-realite* [Pr.]) dan sejarah sebagaimana peristiwa itu dikisahkan (*history as written* atau *histoire-recite* [Pr.]). Sejarah dalam pengertian pertama adalah sejarah sebagai peristiwa. Dalam pengertian ini sejarah memiliki karakter sekali terjadi (*einmalig*), unik, dan tidak bisa diulang. Sejarah dalam pengertian kedua adalah sejarah sebagai kisah. Dalam pengertian ini sejarah dapat ditulis ulang. Sejarawan merekonstruksi kembali peristiwa yang telah berlalu itu. Dalam melakukan rekonstruksi, sejarawan melakukan proses seleksi. Hanya yang “penting” dan “signifikan” yang akan ditulis. Yang perlu diingat adalah “kenyataan sosial yang memperlihatkan bahwa sejarah sebagai gambaran masa lalu dan yang bersifat selektif itu adalah milik masyarakat, bukan milik apalagi monopoli sejarawan” (Abdullah, 2007: 285).

Kedua, berkaitan dengan sejarah dalam pengertian kedua, sejarah sering dijadikan wilayah perebutan hegemoni. Perebutan hegemoni ini bisa dipahami berhubungan dengan ada sebuah diktum yang mengatakan; “siapa yang menguasai kekinian, akan menguasai masa lalu; dan siapa yang menguasai masa lalu akan menguasai masa depan”. Diktum ini berarti bahwa penguasaan masa lalu memberi landasan legitimasi untuk merintis masa depan yang menguntungkan. Hal tersebut hanya memungkinkan terjadi bila masa kini telah kita kuasai.

Ketiga, sejarah adalah masalah pilihan: ada data yang dibiarkan mati, ada data yang dihidupkan, dan bahkan ada yang diabadikan. Jadi, ada tokoh atau peristiwa yang dilupakan, diabaikan, diingat, dan dibesarkan.

Dengan kata lain, dalam upaya merekonstruksi masa lalu itu ada “kekuatan” yang menentukan “pilihan” itu. Kekuatan itu setidaknya ada dua. Pertama adalah masalah yang menjadi perhatian utama (zaman, lokalitas, tema sentral). Kedua adalah teori, filsafat, dan ideologi yang dianut. Yang kedua inilah yang menjadi pangkal perdebatan utama karena ia menentukan pilihan “data sejarah” yang akan dijadikan “fakta sejarah” dan “hierarki fakta” dalam struktur rekonstruksi (Abdullah, 2007: 286).

Semua bermula dari pertanyaan (masalah) yang diajukan. Pertanyaan (masalah) yang diajukan inilah yang menentukan apa yang ingin dicari atau ditemukan. Akan tetapi, hasil rekonstruksi tidak hanya bisa ditanggapi berdasarkan kebenaran empiris dan kejernihan teoretis, tapi juga dari sudut kepentingan politik dan hasrat kultural (Abdullah, 2007: 286 - 287). Kepentingan siapakah, atau pandangan hidup golongan manakah, atau visi kesejarahan siapa yang telah dibela, dilupakan, atau dikesalkan?

Keempat, ada beberapa peristiwa dalam sejarah (nasional) yang bukan saja tercatat dan teringat sehingga menjadi bagian dari ingatan kolektif bangsa, tapi juga diperlukan sebagai simbol. Dengan demikian terjadi perebutan dan persaingan tentang simbol mana yang akan dijadikan ikon sejarah: SDI atau Budi Utomo, Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya atau Ki Hajar Dewantoro dengan Taman Siswanya.

Gugatan terhadap Deislamisasi Historiografi

Gerakan perlawanan terhadap imperialisme disebut sebagai gerakan nasionalisme. Dalam panggung sejarah Indonesia, ulama dan santri adalah pelopor perlawanan terhadap imperialisme. Ulama dan santri adalah termasuk kelompok cendekiawan muslim. Kelompok inilah yang menjadi pemimpin terdahulu pengubah sejarah di Nusantara. Oleh karena itu, seharusnya ulama dan santri ditulis dalam sejarah Indonesia sebagai pembangkit kesadaran nasional di Indonesia.

Istilah nasional sendiri di Indonesia dimasyarakatkan oleh Sentral Syarikat Islam melalui kongres nasional pertamanya dengan sebutan Kongres Nasional (*Nationaal Congress*) di Bandung 17 – 24 Juni 1916 (Suryanegara, 2010: xx). Sebetulnya kongres ini merupakan kongres ketiga SI. Kongres pertamanya dilaksanakan di Surabaya 26 Januari 1913, kongres keduanya dilaksanakan di Solo. Kongres ketiganya dinamai Kongres Nasional. Pada kongres tersebut dihadiri oleh utusan 80 SI Daerah untuk mewakili anggota yang berjumlah 360 ribu. Jumlah seluruh anggota SI pada waktu itu sudah mencapai 800 ribu orang (Pringgodigdo, 1980: 6)

Dalam sejarah Indonesia terkecil istilah nasional diasosiasikan pada Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan di Bandung 4 Juli 1947. Demikian juga istilah “Indonesia” cenderung dikaitkan pada Perserikatan Nasional Indonesia juga. Padahal, istilah “Indonesia” lebih awal dipopulerkan oleh Dr. Soekiman Wirjosandjojo. Beliau yang memelopori perubahan nama *Indische Vereeniging* menjadi Perhimpunan Indonesia pada 1925 di Belanda. Kemudian Majalah *Hindia Poetera* diubahnya menjadi *Indonesia Merdeka*. Akan tetapi karena Dr. Soekiman Wijosandjojo pimpinan Partai Sjarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Islam Indonesia (PII), dan Partai Masyumi – yang *notabene* kesemua partai itu mengeksplisitkan identitas keislamannya – maka nama beliau tidak dicatat sebagai pelopor pertama penggunaan nama/istilah Indonesia (Suryanegara, 2010: xx).

Demikian juga nama dan ketokohan HOS Cokroaminoto tenggelam di balik nama dan ketokohan Bung Karno. Padahal, fakta sejarah menunjukkan bahwa Bung Karno mendirikan PNI tahun 1927, sedangkan HOS Cokroaminoto telah memimpin SI dan menyelenggarakan Kongres Nasional pertamanya pada tahun 1916, selisih waktunya 11 (sebelas) tahun. Dalam kongres itu pun HOS Cokroaminoto sudah memelopori tuntutan Indonesia merdeka atau pemerintah sendiri (*zelf bestuur*). Namun sejarah Indonesia mencatat pelopor semua itu adalah Bung Karno yang dikaitkan pada peristiwa di Pengadilan Kolonial di Bandung tahun 1929 (Suryanegara, 2010: xi).

Selanjutnya, tanggal kelahiran Budi Utomo, 20 Mei 1908, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada kongres pertamanya di Yogyakarta 5 Oktober 1908 ditetapkan tujuan perkumpulan ini, yaitu “kemajuan yang selaras (harmonis) buat negeri dan bangsa”. Banyak orang memandang Budi Utomo ini terlalu lembek karena hanya mencita-citakan “menuju kemajuan yang selaras” buat tanah air dan bangsa. Keanggotaannya pun terlalu sempit, yaitu hanya dari Jawa atau yang berkebudayaan Jawa (Pringgodigdo, 1980: 1 - 2). Sampai dengan kongresnya di Solo 6 – 9 April 1928 (20 tahun setelah pendiriannya), Budi Utomo tetap menolak pelaksanaan cita-cita persatuan Indonesia, termasuk menolak keanggotaan Budi Utomo untuk semua orang Indonesia (Pringgodigdo, 1980: 45). Keterpencilan Cipto Mangunkusumo – seorang anggota BU yang berpikiran progresif, ekstrem, radikan, dan revolusioner – dalam lingkungan BU, sampai akhirnya keluar dari BU karena ketidaksetujuannya akan karakter BU yang moderat, koperatif, dan evolusioner semakin menguatkan pendapat bahwa BU pada masa-masa awalnya anti-nasionalisme. Di samping itu, eksklusivitas keanggotaan BU yang terbatas pada subkultur regional Jawa serta subkultur priyayi menimbulkan reaksi dari subkultur lain untuk mendirikan organisasi sejenis (Kartodirdjo, 1990: 105). Kenyataan ini pun makin menguatkan lagi penilaian seperti di atas.

Terhadap dijadikannya pendirian BU sebagai simbol awal bangkitnya nasionalisme mengundang sejumlah reaksi. Banyak orang yang tidak setuju dengan pendapat bahwa hari lahirnya Budi Utomo sebagai permulaan kebangkitan

nasional. Kelompok tersebut selanjutnya menuntut agar tanggal 16 Oktober 1905 haruslah diakui sebagai permulaan kebangkitan nasional Indonesia,³ karena pada saat itu telah berdiri sebuah organisasi yang bersifat nasional, yaitu Sarekat Dagang Islam (SDI). Pendapat ini didasarkan atas kenyataan objektif, yakni aspek temporal, di mana SDI muncul 3 (tiga) tahun lebih awal. Aspek lain adalah ruang gerak, karakter, dan partisipan organisasi itu. Budi Utomo merupakan organisasi moderat yang sempit, yaitu keanggotaannya semata-mata untuk masyarakat priyayi Jawa dan bukan pembaharuan-pembaharuan radikal untuk kejayaan seluruh rakyat Indonesia,⁴ sedangkan Sarekat Dagang Islam sebaliknya, ia mempunyai basis massa rakyat (tidak terbatas pada status sosial tertentu), juga tidak terbatas pada kelompok etnis tertentu.⁵

Fakta lain adalah tentang Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei. Momentum ini dikaitkan dengan hari lahir Ki Hajar Dewantara yang lahir pada 2 Mei 1888. Ki Hajar Dewantara adalah pendiri Perguruan Taman Siswa, 3 Juli 1922 (Muhsin Z., 2009: 126). Mengapa momentum Hari Pendidikan Nasional itu bukan diambil dari hari lahir K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 1 Agustus 1868. Beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah pada 18 November 1912, sepuluh tahun lebih awal daripada Taman Siswa. Kegiatan utama Muhammadiyah adalah dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Pengaruh Muhammadiyah jauh lebih luas, menjangkau seluruh kota di Nusantara Akan tetapi akibat dari deislamisasi historiografi telah menjadikan K.H. Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya tidak terpilih sebagai pelopor pendidikan nasional (Suryanegara, 2010: xxi).

Di atas hanya disebutkan empat contoh kasus deislamisasi historiografi Indonesia. Ahmad Mansur Suryanegara membeberkan sejumlah kasus lain

³ Deliar Noer. 1980. *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, hlm. 115; juga A. Hasymi. 1986. "Syarikat Islam: Organisasi Modern Tertua di Aceh", *Harmonis*, No. 335 thn. XVI-Thn. RI XLI, 1-4 Maret-19 Jumadilakhir 1406, hlm. 8.

⁴ Savitri Prastiti Scherer. 1985. *Keselarasn dan Kejanggalan: Pemikiran-pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*. Terjemahan S. Rumbo. Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 20.

⁵ Lihat Anggaran Dasar SDI dalam A.P.E. Korver. 1985. *Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil?* Terjemahan Grafitipers. Jakarta: Grafitipers, hlm. 202-207.

mengenai deislamisasi itu. Pendek kata, historiografi Indonesia telah menjadikan Islam dan kaum muslimin sebagai non-faktor dalam dinamika sejarah Indonesia.

Ahmad Mansur Suryanegara pun ingin mengimbangi stigmatisasi yang sudah terlanjur dilekatkan kepada Islam dan kaum muslimin berkaitan dengan ekstremitas dan terorisme. Hal itu dilakukannya melalui penyertaan atribut agama pada negara imperialis. Beliau tidak merasa cukup hanya menyebut Spanyol, Portugis, Belanda, atau Inggris. Akan tetapi beliau menyebutnya Kerajaan Katolik Spanyol, Kerajaan Katolik Portugis, Kerajaan Protestan Belanda, Kerajaan Anglikan Protestan Inggris, Kekaisaran Shinto Jepang. Dengan mengeksplisitkan nama agama, beliau seperti ingin menyadarkan pembaca bahwa aspek *God* (tuhan atau agama yang mereka anut) cukup dominan memotivasi praktik imperialisme.

Simpulan

Pada saat menulis, tidak ada peneliti sejarah yang bisa mendapatkan semua sumber sejarah sekaligus lengkap. Pada sisi lain, teori dan metodologi pun terus berkembang. Atas dasar alasan itulah “penulisan kembali sejarah” sering dilakukan. Dengan demikian, meninjau ulang tulisan sejarah – apa pun modelnya, konstruksi, rekonstruksi, atau dekonstruksi – adalah sesuatu yang lumrah dan “halal” selama hal itu dilakukan dengan pertanggungjawaban ilmiah demi sebuah kebenaran.

Bahkan, seorang sejarawan Amerika, Carl Lotus Becker (1873-1945), lebih ekstrem lagi, melalui artikelnya berjudul “*Everyman His Own Historian*” secara implisit mengesankan bahwa “setiap generasi menulis sejarahnya sendiri”, “setiap rezim menulis sejarahnya sendiri”, “setiap orang boleh menulis ulang sejarah yang pernah ditulis orang lain”. Sejarah adalah dunia kebebasan. Sejarah adalah dunia dialog yang demokratis. Ahmad Mansur Suryanegara dengan *Api Sejarah*-nya adalah sedang mengekspreskan haknya sebagai seorang manusia Indonesia, sebagai seorang sejarawan, dan sebagai seorang muslim untuk menuntut keadilan sejarah dan historiografi. Apa yang dilakukannya patut diapresiasi. Hakim atas karyanya ini adalah khalayak masyarakat pembaca.

Daftar Sumber

- Abdullah, Taufik. 2001.
Nasionalisme dan Sejarah. Bandung: Satya Hitorika.
- Adam, Asvi Warman. 2008.
 “Menggugat Budi Utomo”, *Tempo*, 25 Mei 2008, hlm 52 – 53.
- Harefa, Andrias. 2009.
 “Menulis Buku Best-Seller”, <http://www.pembelajar.com/menulis-buku-best-seller> (6 Agustus 2011)
- Kartodirdjo, Sartono. 1990.
Pengantar Sejarah Indonesia Baru; Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme. Jakarta: Gramedia.
- Muhsin Z., Mumuh. 2009.
Gerakan Pendidikan, Elit Intelektual, dan Nasionalisme (1900 – 1942). Bandung: Yayasan MSI Jawa Barat.
- Noer, Deliar. 1980.
Gerakan Modern Islam di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
- Pringgodigdo, A.K. 1980.
Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. Cetakan ke-9. Jakarta: Dian Rakyat.
- Ricklefs, M.C. 2008.
Sejarah Indonesia Modern 1200 - 2004. Cetakan ke-2. Terjemahan Satrio Wahono dkk. Jakarta: Serambi.
- Suhartono. 1994.
Sejarah Pergerakan Nasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. 2010.
Api Sejarah 1. Cetakan III. Bandung: Salamadani.
- 2010.
Api Sejarah 2. Cetakan II. Bandung: Salamadani.